

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percakapan Khilafah banyak dibicarakan karena adanya kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai konsep Khilafah. Percakapan publik mengenai Khilafah di Indonesia muncul akibat rasa kekhawatiran masyarakat, karena Khilafah dipandang mengancam ideologi negara Indonesia (Ahmad & Zulfidar, 2021). Rasa takut masyarakat ini muncul akibat dari pengalaman sosial kultural dan sosial historis mengenai Khilafah (Ardiansyah, 2017). Disisi lain, perdebatan publik mengenai Khilafah juga muncul karena adanya masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila di Indonesia. Masyarakat yang mendukung Khilafah ini menganggap bahwa bentuk pemerintahan dan ideologi yang diusung oleh Indonesia adalah keliru. Oleh karena itu, menurut mereka, sistem pemerintahan dan ideologi Indonesia harus digantikan oleh sistem dan ideologi khilafah (Bagus et al., 2018). Perbedaan pendapat mengenai Khilafah ini menimbulkan perdebatan yang melibatkan berbagai perspektif seperti agama, politik, sejarah dan sosial pada masyarakat di Indonesia.

Saat ini, di beberapa wilayah Timur Tengah, semangat kekhalifahan muncul sebagai dampak dari munculnya negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Gerakan ini juga diprediksi membawa skenario Khilafah baru (*a new chaliphate*) (Chooper, 2014). Ideologi Khilafah menjadi ancaman bagi prinsip dan aturan negara-negara barat, yang menjadi dasar sistem global saat ini. (Anshori, 2019). Di asia tenggara, keinginan untuk mendirikan negara Khilafah yang diusung oleh Islam Irak dan Suriah (ISIS) terjadi di Marawi, Filipina (Jauhari et al., 2021). Di Indonesia, gerakan mengenai Khilafah yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme dan ormas mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Setelah masa presiden Soeharto berakhir pada tahun 1988, gerakan Khilafah memiliki banyak ruang untuk memperluas keyakinan mereka tentang Khilafah melalui berbagai kelompok dan ormas di Indonesia (Muzakka, 2017). Salah satu organisasi yang paling dikenal dengan aktivitas Khilafah di Indonesia

adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan cabang dari Hizbut Tahrir yang merupakan gerakan politik Islam baru yang memandang politik sebagai kegiatan utamanya dan Islam sebagai doktrin pemandunya (Syah & Setia, 2021). Hizbut Tahrir hadir di Indonesia pada tahun 1983 melalui perantara Abdurrahman Al-baghdadi, seorang anggota Hizbut Tahrir dari Yordania. Organisasi ini kemudian dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia percaya bahwa Indonesia membutuhkan kekuatan-kekuatan Islam untuk menghidupkan kembali umat Islam dalam mengatasi penurunan di beragam bidang di Indonesia (Muzzaka, 2017). Hal ini berarti membebaskan umat Islam dari ideologi dan sistem legislatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut dapat dicapai dengan menegakan sistem Khilafah di Indonesia yang merupakan tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia (Syah & Setia, 2021). Dalam menegakan Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia beberapa kali melakukan beberapa aksi dengan tema yang provokatif seperti "Saatnya Khilafah Memimpin Dunia" dan "Khilafah Kewajiban Syar'i, Jalan Kebangkitan Ummat" yang memicu perdebatan Khilafah di Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang membatalkan badan hukum dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah kelompok masyarakat di Indonesia. Pemerintah menganggap Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi radikal yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan resmi dibubarkan pada 19 Juli tahun 2017 (Syah & Setia, 2021).

Berdasarkan hasil survei Pew Research Center yang dimulai dari Juni hingga September 2022 dengan melibatkan 13.122 responden dari enam negara Asia menyebutkan bahwa 64% persen masyarakat muslim di Indonesia menyatakan kesetujuannya pada syariat Islam sebagai hukum negara (Evans et al., 2023). Sejalan dengan itu, Ideologi khilafah merupakan ideologi yang dibangun berdasarkan hukum Islam dan Tuhan sebagai pusat dan tujuan bernegara (Hamdi et al., 2021). Disisi lain, Khilafah merupakan ideologi yang tidak mempunyai relevansi dengan kehidupan demokrasi yang memposisikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Penolakan terhadap Khilafah juga muncul dari organisasi Islam terbesar yaitu Nahdatul Ulama. Adapun alasan penolakan ini adalah sistem Khilafah yang dipandang bertentangan dengan ideologi

Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan konsensus yang bersifat final (Asror, 2015). Upaya lain diluar konsesus bermaksud merubah sistem tersebut dianggap akan mencederai semangat kemerdekaan yang diproklamirkan pada tahun 1945. Sistem Khilafah juga tidak sejalan dengan masyarakat Indonesia yang dibangun dengan semangat keberagaman dan toleransi (Bagus et al., 2018). Hal ini mengidentifikasi bahwa percakapan mengenai Khilafah selama tahun 2022 dalam upaya untuk mendirikan Khilafah tidak sesuai dengan dasar negara Undang Undang 1945 dan ideologi Pancasila.

Perdebatan seputar Khilafah di Indonesia tidak hanya terjadi di dunia nyata. Namun, perdebatan ini juga menarik perhatian publik secara signifikan, terutama di platform media sosial Twitter yang kemudian berganti nama pada tahun 2023 menjadi X. Adapun penggunaan penamaan Twitter digunakan karena pada saat data diambil yaitu pada 01 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 platform tersebut masih menggunakan penamaan Twitter sebelum berganti menjadi X pada tahun 2023. Perdebatan mengenai Khilafah terpolarisasi di Twitter karena kemudahan seseorang dalam berpendapat secara anonimitas di Twitter (Hasfi et al., 2017). Anonimitas merupakan fasilitator kebebasan berekspresi karena pengguna tidak menggunakan identitas aslinya (Widyanuratikah, 2023). Selain itu, akun Twitter dengan jumlah pengikut yang banyak seperti *influencer*, *buzzer* atau *selebtwit* juga berperan sebagai *opinion leaders* menjadikan banyaknya perdebatan percakapan di Twitter (Khatami & Kurnia, 2022). Platform Twitter mempunyai fitur *hashtag* dan *trending topic*, yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengikuti diskusi tentang Khilafah yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. (Umar et al., 2022).

Sepanjang tahun 2022 pada media sosial Twitter terjadi kembali percakapan menarik tentang Khilafah di dalam aktivitas diskusi sosial masyarakat yang ditandai dengan munculnya *tweet* yang kontroversial mengenai Khilafah. Hal ini bisa dilihat dari data percakapan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Grafik Percakapan Tentang Khilafah

Sumber: *Drone Emprit* (2022)

Berdasarkan grafik percakapan mengenai Khilafah diatas, Periode Oktober akhir hingga awal Desember merupakan periode yang ramai membicarakan mengenai Khilafah di Twitter. Adapun total *mention* pada periode tersebut merupakan total *mention* tertinggi yaitu terdapat total 15 ribu *mention*. Pada periode tersebut percakapan mengenai Khilafah ramai dibicarakan berkat sebuah *tweet* kontroversial yang mengubah konsep Khilafah menjadi istilah yang merendahkan, yaitu "*Khilafuck*." Kejadian ini menciptakan gelombang diskusi dan reaksi di media sosial, mencerminkan dinamika kompleks dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti Khilafah di ranah digital Indonesia.

Tabel 1.1 Grafik Percakapan Tentang Khilafah

Sentimen	<i>Tweet</i>
Negatif	<p>Postingan</p> <p>Dede Budhyarto @kangdede78</p> <p>Memilih capres jgn sembrono apalagi memilih Capres yg didukung kelompok radikal yg suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yg melarang pendirian rumah ibadah minoritas.</p> <p>5:36 PM · 23 Okt 2022</p> <p>1 rb 420 1 rb 8</p>
Positif	<p>Postingan</p> <p>Abu Althafalhusein @althafalhusein</p> <p>Tiada lelah bagiku tuk memohon dan meminta petunjuk dariMu, Ya Allahbimbinglah aku kejalan yang lebih baik Tetap Dakwahkan Syariah Khilafah .✅. #jj4a</p> <p>6:17 AM · 29 Jan 2023</p>



Sumber: Twitter (2022)

Sebagian orang yang menentang pernyataan tersebut berpendapat bahwa kata Khilafah merupakan terminologi Islami yang termasuk ajaran Islam yang tidak boleh diplesetkan dan direndahkan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kata tersebut dalam konteks yang merendahkan seperti "*Khilafuck*" dianggap tidak hanya sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai keagamaan, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Disisi lain, sebagian orang berpendapat bahwa Khilafah bukan merupakan kata yang suci dan bukan merupakan agama, melainkan sistem pemerintahan. Berdasarkan kedua pendapat yang berbeda tersebut menjadikan percakapan mengenai Khilafah ramai dibicarakan banyak orang di Twitter. Topik ini menarik untuk diteliti karena diskusi mengenai khilafah di Indonesia dipahami dan diinterpretasikan oleh berbagai kelompok masyarakat yang membawa pandangan yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan. Ini menciptakan ruang yang kaya untuk eksplorasi dalam penelitian, terutama dalam konteks bagaimana ideologi Khilafah dipersepsikan dan diperdebatkan di ruang publik

Berdasarkan hal tersebut, analisis sentimen mengenai isu Khilafah di Twitter relevan untuk diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis Twitter akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana sentimen percakapan yang terkait dengan Khilafah dipahami dalam konteks. Tujuan melakukan analisis sentimen ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana opini publik mengenai isu Khilafah. Penelitian ini relevan untuk diteliti karena berkaitan dengan isu Khilafah yang masih dibicarakan oleh masyarakat terutama

di media sosial Twitter. Urgensi dalam penelitian ini adalah Mayoritas muslim di Indonesia mendukung berdirinya sistem Khilafah di Indonesia, akan tetapi ideologi Khilafah tidak sesuai diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan kehidupan demokrasi. Hal ini menjadikan penelitian tentang analisis sentimen terkait isu khilafah selama tahun 2022 relevan untuk diteliti untuk mengetahui sentimen opini publik terhadap Khilafah di Indonesia, topik apa yang sering dibahas terkait dengan isu Khilafah dan bagaimana sentimen negatif dan positif terhadap isu Khilafah terbentuk di Indonesia. Melihat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendekatan analisis Twitter mengenai isu Khilafah sangat jarang dibahas. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan literasi penelitian melalui pemanfaatan metode pendekatan analisis sentimen serta meningkatkan lagi penelitian yang berkaitan dengan isu Khilafah di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana publik secara umum memandang Khilafah dilihat dari sentimen di Twitter.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Perdebatan mengenai Khilafah banyak dibicarakan karena adanya kontroversi dan perbedaan mengenai konsep Khilafah di Indonesia. Adanya pro dan kontra dari pengguna Twitter mengenai Khilafah menjadikan penelitian mengenai analisis sentimen diperlukan untuk mengetahui sentimen publik mengenai Khilafah pada masa sekarang. Maka dari itu, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana sentimen masyarakat Indonesia mengenai isu Khilafah di Twitter?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan manfaat pelaksanaan arti luas (praktis).

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian teori dan konsep mengenai sentimen publik di media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama di mana opini publik terbentuk, disebarluaskan, dan diperdebatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik di bidang Ilmu Komunikasi dengan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai topik sentimen publik di media sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan opini publik serta mengukur dan menganalisis sentimen pada suatu topik di media sosial. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan berbeda kepada para praktisi di bidang Ilmu Komunikasi dalam penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang menggunakan metodologi dan strategi analisis opini publik melalui platform media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya dan mengembangkan pada bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang terkait dengan sentimen publik dalam menganalisis perdebatan Khilafah pada media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, dengan harapan bahwa penemuan-penemuan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan sebagai wawasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Menentukan Judul									
2	Persetujuan Judul									
3	Penyusunan Proposal									

4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengelolaan dan Analisis Data								
7	Sidang Skripsi								